BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peradilan hukum dijalankan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini Mahkamah Agung serta badan-badan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peradilan etik merujuk pada proses penegakan kode etik yang dilakukan oleh lembaga atau badan tertentu untuk memastikan bahwa para pejabat atau profesional dalam bidang tertentu bertindak sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Dalam Konsep kekuasaan kehakiman antara peradilan hukum dan peradilan etik memiliki mekanisme proses peradilan yang terpisah. Hal ini terbukti dari pertama sumber dari keduanya yang berbeda dimana hukum merupakan dasar dari peradilan hukum sedangkan kode etik adalah dasar dari peradilan etik. Kedua, tidak adanya keterkaitan antara peradilan hukum dan peradilan etik, meskipun secara konsep etik dikatakan sebagai dasar dari hukum namun secara praktik kedua peradilan itu berjalan sendiri-sendiri.
2. Dalam konsep siyasah qadhaiyyah, terdapat penggabungan prinsip-prinsip hukum syariah dengan norma-norma etika untuk membangun sistem peradilan. *Siyasah qadha'iyah* sendiri berfokus pada administrasi keadilan dan pengaturan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral. Meskipun secara eksplisit peradilan etik dalam konsep *siyasah qadha'iyah* tidak

disebutkan namun, tergambar nya nilai nilai moral dalam mekanisme sistem peradilan hukum Islam serta termuat nya dalam hukum syariah dapat dikatakan bahwa antara peradilan hukum dan peradilan etik tidak terdapat pemisahan yang artinya kedua peradilan tersebut merupakan satu kesatuan.

3. Integrasi antara peradilan hukum dan peradilan etik di Indonesia perlu dilakukan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan hukum. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengupayakan beberapa cara antara lain: a) Pembentukan kerangka hukum dan etika yang jelas; b) Pembentukan dan penguatan kelembagaan serta prosedur; c) Adopsi dan Penerapan Konsep Baru. Namun integrasi tersebut juga memiliki tantangan salah satunya karena adanya perbedaan aliran filsafat hukum di Indonesia. Dimana saat ini di Indonesia sistem hukumnya berpaham paradigma hukum positivisme. Oleh karena itu guna membangun paradigma hukum yang berkeadilan substantive perlu disandingkan berbagai paradigma hukum yang berkembang termasuk paradigma hukum hasil dari pemikiran ahli hukum Indonesia yang terbangun dalam teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integrative, yang kesemuanya merupakan koreksi dari paradigma positivisme hukum.

B. Saran

Bahwa dalam peradilan hukum sebagaimana dijalankan oleh MA dan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman saat ini hendaknya dibarengi dengan berjalannya peradilan etik yang mana yakni MKH beserta KY dan MKMK yang tidak hanya hadir disaat sudah terjadi sebuah pelanggaran etik, namun juga dapat beriringan dengan peradilan hukum itu sendiri. Jika terdapat situasi

terdapat pelanggaran etik dalam mekanisme persidangan maka keberadaan peradilan etik tersebut dapat menjadi pencegah sebelum lahirnya produk hukum (putusan pengadilan) yang salah. Hal ini tentu bukan sebagai bentuk dari adanya intervensi namun sebagai upaya dalam mewujudkan kualitas produk hukum yang sesuai dengan misi suci dari peradilan hakum itu sendiri, yakni sebagai tempat guna menegakkan bagian demi bagian dari hukum sesuai dengan amanat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI 1945.